

DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN PERUBAHAN POLA ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU UMKM EKSPOR DAN IMPOR (Studi terhadap Pengusaha Ekspor dan Impor di Banda Aceh)

Candra Adi Kurnia¹

¹Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

¹candra.kurnia@ar-raniry.ac.id

Abstract

Administration is an important part of doing business for both small and large businesses, including export and import business. CV. Donya Drop Daruet is one of the exporters and importers in Banda Aceh. The routine of this company experienced challenges during the Covid-19 Pandemic. This research uses qualitative research with observation data collection methods, interviews and supported by secondary data. The administrative pattern did not change significantly. However, there were changes to the technical implementation. The findings of this study have occurred that since the pandemic era, there have been technical changes in the implementation of export and import activities which were previously implemented in Aceh Province through Sultan Iskandar Muda Airport and export-import doers acting for and on their own behalf, but since the pandemic era, consolidator services and implementation processes were needed must be done through the Port of Belawan, North Sumatra. The changes in administrative patterns and the impact of the Covid-19 pandemic can be minimized if Aceh Government can maximize export-import services at loading ports in Aceh Province.

Keywords: *export import, MSEs, Covid-19 pandemic*

A. Pendahuluan

Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Keberadaan mereka dalam aktivitas ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan, keberadaan mereka secara superior mendominasi usaha nonpertanian yang ada di Indonesia. Data BPS menunjukkan saat ini ada 26 juta UMKM atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian yang ada di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja non pertanian (BPS, 2019).

Pada tataran implementasi, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2017, peran pelaku UMKM dalam aktivitas ekspor impor ternyata masih sangat kecil, yakni hanya 14,17% saja (www.depko.go.id). Hal ini bisa jadi paradigma ekspor impor di masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan ekspor impor adalah aktifitas yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dengan sistem administrasi birokrasi yang rumit serta membutuhkan modal yang banyak, sehingga 85,83 persen pelaku UMKM

lainnya hanya berfokus pada pasar domestik. Pasar dalam negeri Indonesia memang cukup besar dengan jumlah populasi Indonesia yang sudah mencapai 269 juta jiwa, namun jika dibandingkan dengan penduduk dunia yang mencapai 7,4 miliar jiwa tentu saja pasar ekspor memberikan kesempatan dan pangsa pasar yang jauh lebih luas. Lebih dari itu, aktifitas ekspor dan impor tidak hanya berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia, namun juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penerimaan negara dari sektor devisa dan pajak yang merupakan komponen utama pendapatan negara. Berdasarkan pada fakta tersebut, sudah seharusnya Pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk memasarkan produknya ke pasar internasional, termasuk Pemerintah Aceh.

Aktifitas ekspor di Provinsi Aceh untuk sektor non migas ternyata masih didominasi oleh komoditas batubara, minyak sawit mentah dan sulfur dengan total jumlah ekspor (FoB) pada tahun 2019 mencapai 164,56 juta USD. Sedangkan untuk aktifitas impor, komoditi non migas terbesar adalah kelompok komoditi mesin/peralatan listrik yang berupa *Generating sets* (gasoline engine) dengan nilai sebesar 105,49 juta USD (BPS Provinsi Aceh, 2019).

Selain tiga komoditas di atas, kopi, pala, cengkeh, coklat dan minyak nilam juga merupakan komoditas ekspor dari Aceh yang diminati oleh masyarakat mancanegara. Kota Banda Aceh, sebagai ibukota provinsi memiliki beberapa eksportir salah satunya adalah eksportir kopi. Eksportir kopi merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mulai beroperasi di Banda Aceh. Berbagai alat pendukung ekspor kopi seperti plastik *greenpro*, kemasan kopi, serta alat-alat dan mesin kopi sebagian besarnya bukanlah produk hasil produksi dalam negeri sehingga pelaku usaha masih bergantung pada importir yang memasukkan berbagai barang keperluan tersebut ke Indonesia termasuk Aceh.

Tulisan ini akan mengkaji tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Banda Aceh. Fokus dari kajian ini adalah usaha CV Donya Drop Daruet. Pilihan terhadap CV Donya Drop Daruet karena di Banda Aceh perusahaan ini menjadi satu-satunya usaha yang aktif melakukan aktifitas impor secara langsung melalui Pelabuhan Muat Udara Sultan Iskandar Muda dengan jenis komoditas kemasan kopi dimana selanjutnya komoditas tersebut tidak hanya dipergunakan untuk kebutuhan sendiri namun juga di distribusikan ke seluruh Aceh dan bahkan Indonesia.

Aktifitas ekspor yang dilakukan oleh CV. Donya Drop Daruet melalui Pelabuhan Muat Udara Sultan Iskandar Muda berfokus pada komoditas kopi yang mana hingga akhir tahun 2019 telah melakukan pengiriman ke Taiwan, Jepang dan Perancis. Pada awal tahun 2020, CV. Donya Drop Daruet berencana untuk merealisasikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi IKM yang dicanangkan oleh Bea Cukai sebagai upaya mendorong daya saing produk dalam negeri untuk bersaing di kancah internasional, namun Pandemi Covid-19 membuat konektivitas udara yang menghubungkan Provinsi Aceh secara langsung dengan negara luar melalui maskapai udara berhenti beroperasi

Candra Adi Kurnia

sehingga komoditi dengan umur simpan rendah seperti *roasted bean coffee* dan lobster hidup sulit untuk didistribusikan.

Rentang waktu 2017 hingga 2019 CV. Donya Drop Daruet aktif melakukan transaksi operasional baik ekspor maupun impor yang didukung oleh proses birokrasi di Pemerintahan Daerah dan Pusat. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat guna meningkatkan usaha ekspor dan impor ini berdampak positif terhadap UMKM sejenis *Coffee Shop* dan Souvenir Aceh, karena *Coffee Shop* dan Souvenir pada umumnya juga melakukan kegiatan retail kopi.

Masa pandemi *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat dengan Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha ekspor impor CV. Donya Drop Daruet. Rentang waktu Maret 2020 hingga akhir September 2020 *berbagai* unit usaha yang dijalankan mengalami kemunduran baik ekspor, impor maupun *Coffee Shop*.

Sebelum masa pandemi, CV. Donya Drop Daruet melakukan aktifitas impor setiap dua bulan sekali dan kegiatan ekspor sebanyak 4 kali. Kegiatan ekspor kopi ke luar negeri dan impor barang dari luar negeri ke dalam memiliki penurunan yang signifikan yang berdampak pada usaha-usaha hilir industri kopi.

Berangkat dari rutinitas kegiatan ekspor impor CV. Donya Drop Daruet yang memiliki dampak dengan adanya Pandemi Covid-19, maka penelitian ini akan membatasi pada satu pertanyaan bagaimanakah tantangan bisnis UMKM CV. Donya Drop Daruet di masa pandemi

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kebiasaannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya (Rahmat, 2019). Sugiyono (2017) proses pengumpulan data menggunakan metode observasi terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan yang diteliti, wawancara yang dimulai dari mendengarkan, menyusun kata (*paraphrasing*), *probing*, dan meringkas hasil wawancara tanpa menghilangkan substansi informasi yang disampaikan oleh informan (Byrne, 2001). Saifuddin (2014) telaah dokumen yang dilakukan untuk memperoleh data pada objek penelitian yang didukung dengan kajian kepustakaan, selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari website atau internet (Sekaran, 2006). Sugiyono (2003) data sekunder merupakan sumber data yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan reduksi data.

C. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (Kristiani dan Rahmasari, 2015).

Ekspor dan impor adalah dua sisi kegiatan bisnis yang saling terkait namun berbeda. Marolop Tandjung (2011) mendefinisikan ekspor sebagai kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabeanan Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan. Sedangkan Amir M.S (2004) menjelaskan ekspor sebagai upaya melakukan penjualan komoditas di Indonesia kepada negara lain, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komoditi dengan memakai bahasa asing.

Definisi impor, masih menurut Marolop Tandjung adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Astuti Purnamawati mendefinisikan impor sebagai tindakan membeli barang-barang dari

Candra Adi Kurnia

luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.

Kota Banda Aceh merupakan pusat ibukota Provinsi Aceh. Sebagai pusat ibukota Provinsi Aceh tentunya Kota Banda Aceh menjadi tujuan masyarakat Aceh untuk membuka usaha, tidak terkecuali bidang *Coffee Shop*. Pasca bencana alam gempa dan tsunami serta pasca perdamaian MoU Helsinki, warung kopi menjadi trend baru untuk berkumpul, berdiskusi maupun kegiatan politik. Selain tempat diskusi, warung kopi di Banda Aceh juga menjadi destinasi wisata lokal, nasional dan mancanegara (<https://medanbisnisdaily.com>)

Observasi peneliti ke beberapa usaha warung kopi (*gerobak arabica café, sada kopi, rumoh aceh kupie, solong coffee, dan linge café*) dan usaha souvenir (*pusaka souvenir, putroe aceh souvenir, atjeh collection, dan istana souvenir*) Kota Banda Aceh menemukan bahwasanya usaha tersebut juga menyediakan penjualan kopi dalam kemasan.

1. Profil CV. Donya Drop Daruet

Perusahaan CV. Donya Drop Daruet berdiri sejak tahun 2013 di Banda Aceh. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa mahasiswa yang menempuh studi di Taiwan. Menurut Usuluddin, bahwasanya CV. Donya Drop Daruet didirikan sebagai sarana bisnis kecil-kecilan beberapa mahasiswa aceh yang sedang menempuh studi di Taiwan. Sebagaimana kutipan pernyataan wawancara dengan Direktur CV. Donya Drop Daruet

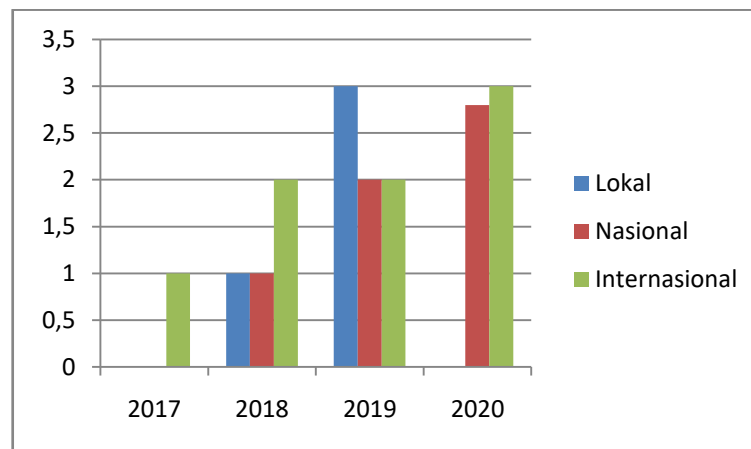
"Founded in 2013, CV. Donya Drop Daruet has started with a dream to become a facilitator, solution hub, and partner to all coffee activities. Our channels have linked from farmers, coffee tools and machine manufacturers to the coffee society. This mutualism collaborations elaborated us to create solutions for every difficulties that may founded in coffee industry. Our partnership with farmers enables us to become one of sustainable exporters for Gayo Arabica Green Beans Coffee. Furthermore, we also provide coffee tools, machineries and coffee packaging to support coffee traders sell their roasted coffee. And, as the demands to serve brewed coffee increased, since February 2019 we also found a coffee house under the name "Donya Kupie" to educate and satisfy coffee lovers with classy coffee serving."

Lebih lanjut lagi, menurut pernyataan hasil wawancara dengan Executive Summary CV. Donya Drop Daruet

"Didirikan pada tahun 2013, CV. Donya Drop Daruet mengawali dengan mimpi menjadi fasilitator, solution hub, dan partner bagi semua kegiatan ngopi. Saluran kami telah terhubung dari petani, alat pembuat kopi dan mesin ke masyarakat kopi. Kolaborasi mutualisme ini memandu kami untuk menciptakan solusi atas setiap kesulitan yang mungkin ditemui di industri kopi. Kemitraan kami dengan petani memungkinkan kami

menjadi salah satu eksportir berkelanjutan untuk Kopi Kacang Hijau Arabika Gayo. Selain itu, kami juga menyediakan peralatan kopi, mesin-mesin dan pengemas kopi untuk mendukung pedagang kopi menjual kopi sangrai. Dan, seiring dengan meningkatnya permintaan untuk menyajikan kopi seduh, sejak Februari 2019 kami juga menemukan kedai kopi dengan nama "Donya Kupie" untuk mengedukasi dan memuaskan para pecinta kopi dengan sajian kopi yang berkelas."

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan CV. Donya Drop Daruet dalam upaya memperluas pangsa pasar adalah mengikuti pameran bertaraf lokal, nasional dan internasional.



Sumber: Diolah dari data CV. Donya Drop Daruet

2. Proses Birokrasi Ekspor dan Impor di Aceh

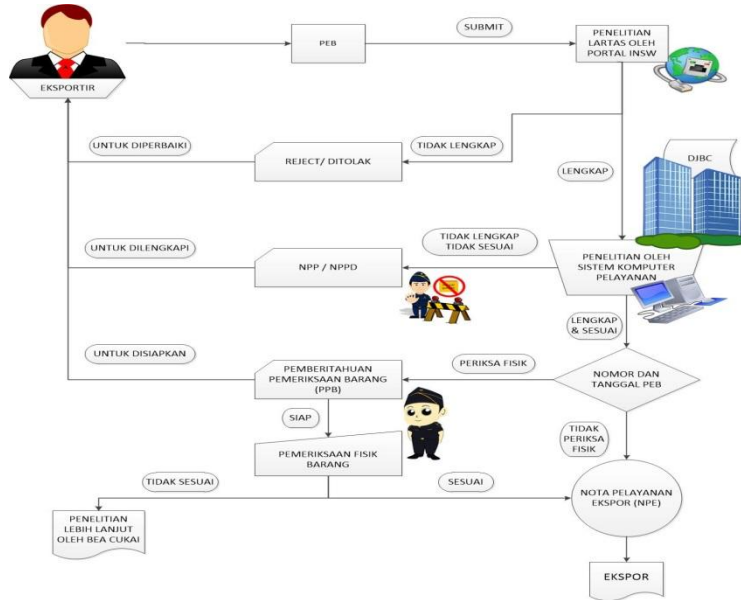
Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Yang bunyinya dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum,
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia,
3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat (Gandasubrata, 1999).

Berangkat dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, maka proses birokrasi administrasi didasarkan pada aturan yang ada di pemerintahan. Tata laksana kegiatan ekspor impor juga tidak bisa dilepaskan dari aturan Pemerintah yang merupakan suatu kegiatan yang harus melalui proses administrasi birokrasi (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014).

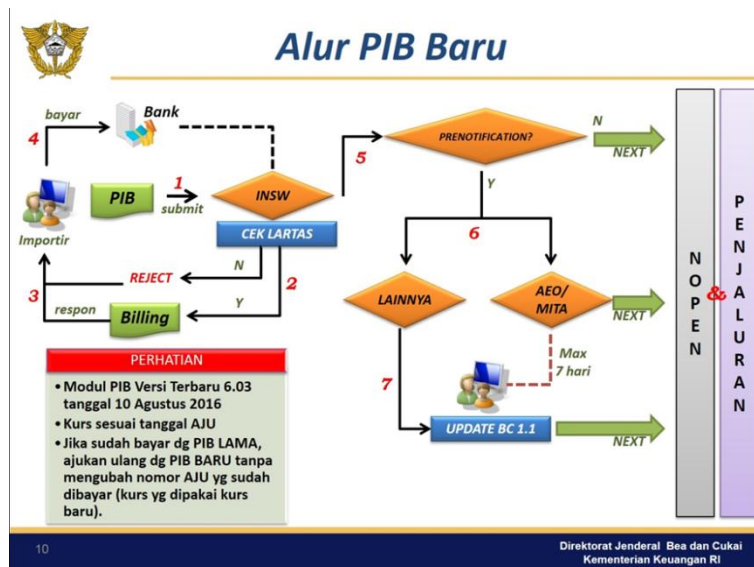
Proses tata laksana birokrasi ekspor dan impor memiliki birokrasi yang berbeda, seperti di bawah ini:

Alur Administrasi Ekspor menurut Direktorat Jenderal Bea Cukai



Sumber: <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>

Alur Administrasi Impor Umum



Sumber: <https://bcternate.beacukai.go.id/impor/>

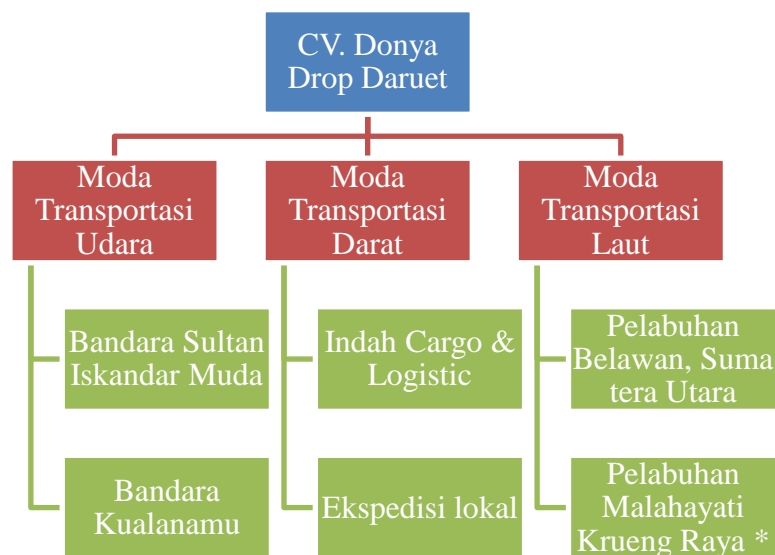
3. Dampak Covid-19 terhadap Pengusaha Ekspor dan Impor

Pandemi covid 19 merupakan bencana global dan menghambat sebahagian bisnis yang ada di dunia. Di Indonesia saja tercatat ada 30 juta UMKM yang tutup sejak masa pandemi Covid-19 (<https://tirto.id/>), dan ada 47 persen UMKM yang bangkrut selama pandemi ini (<https://bisnis.tempo.co/>). Dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan pada skala nasional, akan tetapi juga secara signifikan memberikan efek negatif pada skala lokal, hal ini terlihat pada jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdampak akibat pandemi sebanyak 102 ribu (<https://www.popularitas.com/>).

Data yang dipaparkan diatas merupakan bahagian terkecil yang berdampak langsung terhadap dunia UMKM baik skala nasional maupun Aceh. Selain hal tersebut, ditambah lagi dengan adanya perubahan pola administrasi dalam melaksanakan bisnis ini membuat pelaku usaha harus beradaptasi dengan situasi yang ada untuk tetap bisa bertahan.

Catatan CV. Donya Drop Daruet, yang ditemukan oleh peneliti, ada beberapa moda transportasi yang pernah digunakan untuk menjalankan aktifitas ekspor dan impor. Adapun pola moda transportasi yang digunakan untuk melakukan distribusi barang pada CV. Donya Drop Daruet dapat dijelaskan pada skema berikut ini:

Skema Moda Transportasi yang Digunakan untuk Aktifitas Ekspor Impor pada CV. Donya Drop Daruet dalam Kondisi Normal



Sumber: diolah dari data dokumen CV. Donya Drop Daruet

Selama masa Pandemi Covid-19 ada kekhawatiran terbesar yang dirasakan oleh pelaku UMKM terutama yang berorientasi ekspor dan impor, kekhawatiran ini tidak hanya pada turunnya jumlah permintaan, namun juga terjadinya perubahan pola

Candra Adi Kurnia

pengiriman karena industri penerbangan juga terkena dampak dari Covid-19 ini. Kondisi ini juga dirasakan oleh CV. Donya Drop Daruet. Karena ada perubahan pola administrasi yang dilakukan untuk aktifitas impor, maka jika sebelumnya CV. Donya Drop Daruet selaku importir dapat bertindak atas namanya sendiri dalam proses penerimaan barang dari eksportir di negara pengirim kini harus menggunakan jasa pihak ketiga. Demikian juga halnya ketika melakukan kegiatan ekspor.

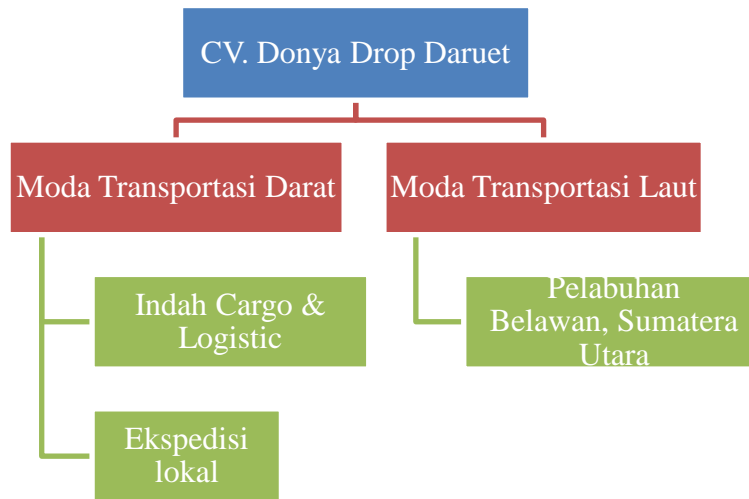
Sejak berhenti beroperasinya moda transportasi udara ke luar negeri dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, CV. Donya Drop Daruet membutuhkan jasa konsolidator untuk proses kegiatan ekspor dan impor. Penggunaan jasa konsolidator menjadi satu-satunya pilihan karena pengiriman dan atau penerimaan barang hanya mungkin dilakukan melalui Pelabuhan Belawan yang ada di Sumatera Utara. Hal ini tentunya menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan waktu yang panjang sehingga beberapa produk yang memiliki nilai tambah seperti kopi bubuk dan makanan olahan tidak dapat dikirimkan.

Saat ini, berdasarkan data dari BPS, ada tujuh pelabuhan di Provinsi Aceh yang dapat dan telah melakukan aktifitas ekspor dan impor, diantaranya adalah Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Calang, Pelabuhan Blang Lancang (Arun), Pelabuhan Lhoseumawe, Pelabuhan Krueng Raya (Malahayati), Pelabuhan Kuala Langsa dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPS Provinsi Aceh, 2019). Hanya saja, aktifitas ekspor dan impor pada pelabuhan-pelabuhan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila pelaku usaha juga menyediakan armada angkutan laut, dikarenakan pada seluruh pelabuhan bongkar muat yang ada di Provinsi Aceh tersebut belum terdapat *Shipping Agent* atau *Representative Agent*-nya.

Keberadaan perusahaan bongkar yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke atas kapal serta kehadiran perusahaan pelayaran barang tersebut sangat erat kaitannya dengan arus kegiatan ekspor dan impor sehingga ketiadaannya dapat menghambat transaksi perdagangan internasional di suatu daerah (Sasono, 2012).

Maka dari itu, pelaku UMKM berorientasi ekspor dan impor di Aceh yang komoditinya juga berasal dari Aceh sangat bergantung pada Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara yang merupakan akses terdekat dari Provinsi Aceh dan sudah memiliki manajemen pelabuhan bongkar muat yang lengkap. Pelabuhan Belawan juga menjadi satu-satunya alternatif dikarenakan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh tidak lagi melayani rute penerbangan luar negeri.

Skema Moda Transportasi yang Digunakan untuk Aktifitas Ekspor Impor pada CV. Donya Drop Daruet selama Pandemi Covid-19



Sumber: diolah dari data dokumen CV. Donya Drop Daruet

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berorientasi ekspor impor di Aceh. Dampak negatif tersebut tidak hanya pada menurunnya jumlah penjualan, namun juga membuat terjadinya perubahan pola administrasi pada pelaksanaan ekspor impor.

Perubahan ini menjadikan komponen biaya pada proses administrasi ekspor dan impor meningkat karena produk harus dikirimkan secara khusus ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Selama proses administrasi berjalan, pelaku usaha harus menyiapkan biaya tambahan untuk sewa gudang penyimpanan barang dan juga harus membayar jasa konsolidator untuk pengurusan administrasi ekspor/impor.

Proses pengiriman atau pemesanan barang dengan menggunakan jasa kapal laut juga membutuhkan waktu yang lama sehingga untuk barang dengan umur simpan rendah seperti kopi yang telah disangrai, lobster dan kepiting hidup tidak mungkin dikirim dengan menggunakan jasa kapal laut. Lamanya proses distribusi barang tersebut juga membuat pelaku usaha harus meningkatkan jumlah barang yang diimpor untuk menjaga *inventory* barang. Peningkatan jumlah pemesanan membuat modal yang harus dikeluarkan untuk membeli barang secara otomatis bertambah.

Provinsi Aceh juga berpotensi mendapatkan dampak dari perubahan pola administrasi ekspor impor tersebut. Rumitnya urusan administrasi karena terkendala jarak

Candra Adi Kurnia

membuat proses administrasi ekspor impor terkadang diserahkan sepenuhnya kepada Konsolidator sehingga komoditi yang diekspor berpotensi tercatat sebagai produk dari Sumatera Utara. Pajak yang dibayar oleh pelaku usaha juga tercatat sebagai penerimaan yang berasal dari Sumatera Utara. Tentu saja hal ini dapat merugikan Pemerintah Provinsi Aceh karena dapat dianggap sebagai daerah dengan hasil komoditas non migas yang rendah. Begitu juga dengan nilai penerimaan pajaknya.

Menyikapi berbagai hal tersebut diatas, untuk mengantisipasi berbagai hal negatif yang terjadi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 ini terhadap pelaku UMKM yang berorientasi ekspor impor, maka Pemerintah Aceh sebaiknya segera memaksimalkan menggunakan pelabuhan-pelabuhan bongkar muat yang ada di dalam Provinsi Aceh. Keberadaan pelabuhan laut yang aktif melakukan kegiatan bongkar muat barang akan berdampak pada pertumbuhan sektor perekonomian di daerah tersebut karena ketersediaan dan arus distribusi barang berjalan lancar.

Bagi negara, pelaksanaan ekspor impor ini tentunya akan menjadi sumber devisa andalan guna mengisi cadangan devisa negara. Ketersediaan berbagai bahan dan mesin kebutuhan industri sektor riil baik dari hulu sampai ke hilir juga berdampak pada meningkatnya jumlah perusahaan yang membuka pabriknya sehingga ketersediaan tenaga kerja bertambah dan nilai investasi bertumbuh.

D. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berorientasi ekspor impor di Aceh. Dampak negatif tersebut menyebabkan jumlah penjualan yang terus merosot dan terjadinya perubahan pola administrasi pada pelaksanaan ekspor impor. Perubahan pola administrasi tersebut membuat jangka waktu distribusi barang menjadi lebih lama dan komponen biaya bertambah.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan memaksimalkan menggunakan pelabuhan-pelabuhan bongkar muat yang ada. Keberadaan pelabuhan laut yang aktif melakukan kegiatan bongkar muat barang akan berdampak pada pertumbuhan sektor perekonomian di daerah tersebut karena ketersediaan dan arus distribusi barang berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S. (2004), *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM
- Anwar Saifudin, (2014), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Astuti Purnamawati, (2013), *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, Sinar Grafindo, Yogyakarta
- Byrne, M., *Interviewing as a data collection method*. *Association of Operating Room Nurses*.
AORN Journal; 74, 2: 233-234. 2001
- http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/Sandingan_Data_UMKM_2012-2017_.pdf
- Katalog 9102062 Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil, Badan Pusat Statistik, 2019
- Katalog BPS: 8202010.11 Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Aceh, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 2019
- Mariyana Kristianti dan Risda Rahmasari, *Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang*, *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)* Vol 13 No 2, 2015
- Marolop Tandjung, (2011), *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. Jakarta : Salemba Empat
- Pupu Saeful Rahmat, *Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari-Juni 2009
- Purwata Gandasubrata, (1999), *Indonesia Negara Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2003), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Uma Sekaran, (2006), *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat